

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN DISIPLIN  
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS  
DISEASE* 2019 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PALEMBANG TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh:**

**EDWIA PUTRI  
NIM.07011281823194**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### “Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang”

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Edwia Putri

NIM.07011281823194

Pembimbing I

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si

NIP.196311061990031001

Tanda Tangan



Tanggal

29/7/2022

Pembimbing II

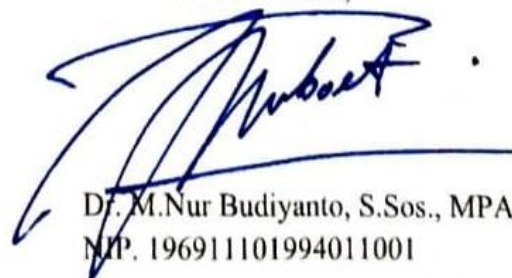
2. Dra. Martina, M.Si

NIP.196603051993022001



29/7/2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

## “Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang”

Skripsi

Oleh :

Edwia Putri

NIM.07011281823194

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 03 Agustus 2022

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP.196311061990031001
2. Dra. Martina, M.Si  
NIP.196603051993022001

Tanda Tangan

Penguji :

1. Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP.196612301992032001
2. Drs Gatot Budiarto, M.S  
NIP.195806091984031002

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,  
  
Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP.196601221990031004

Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
  
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP.196911101994011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwia Putri  
Nim : 07011281823194  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 12 Juni 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin  
Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan  
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019  
Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, Juli 2022



: membuat pernyataan,

Edwia Putri

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”**

**(B.J. Habibie)**

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini  
saya persembahkan untuk:**

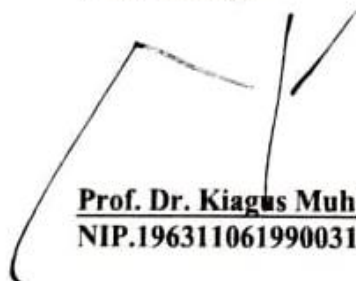
1. Kedua Orangtuaku, Ayah M.Putra dan Ibu Samsiah
2. Saudara dan Saudariku, Abangku Esa Putra, Adekku Etri Putri dan Adekku Eishea Putri
3. Sahabatku dan Teman-teman AP 2018
4. Almamaterku

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2021. Latar belakang masalah penelitian ini ialah protokol kesehatan pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang tidak dipatuhi dengan baik, banyak pegawai yang mengabaikan protokol kesehatan dan fasilitas protokol kesehatan kurang memadai serta fasilitas yang adapun jarang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori Randall B. Ripley dan Grance A. Franklin yang terdiri dari 3 dimensi yakni tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis data, Implementasi kebijakan protokol kesehatan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang kurang berjalan dengan baik. Fasilitas protokol kesehatan kurang memadai dan fasilitas yang ada tidak digunakan dengan baik. Pihak yang terlibat dalam kebijakan seperti Satuan tugas Covid-19 belum menjalankan tugasnya dengan maksimal. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan lebih ditingkatkan lagi dalam hal penyediaan fasilitas dan kedisiplinan pegawai Sekretariat Daerah Kota Palembang.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Protokol, Kesehatan, Fasilitas

**Pembimbing I**



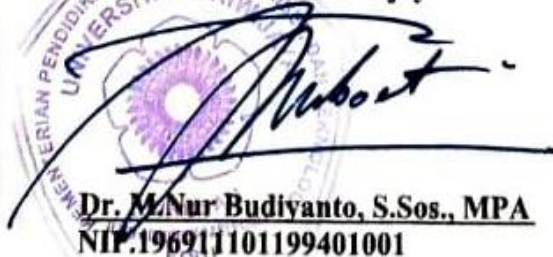
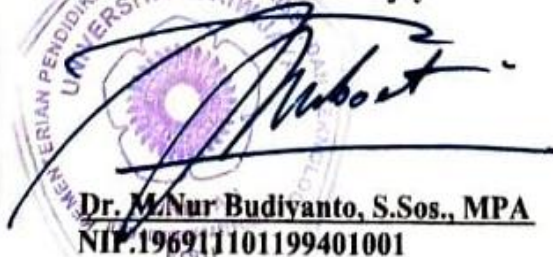
**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP.196311061990031001

**Pembimbing II**



**Dra. Martina, M.Si**  
NIP.196603051993022001

Indralaya, 2022  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



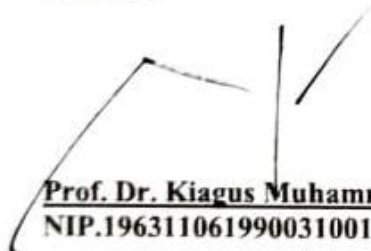
**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA**  
NIP.196911101199401001

## ABSTRACT

*This study examines the Implementation of Health Protocol Discipline Enforcement Policies in the Context of Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 at the Palembang City Regional Secretariat in 2021. The background of this research problem is that the health protocols at the Palembang City Regional Secretariat office were not followed properly, many employees ignored health protocols and inadequate health protocol facilities and existing facilities were rarely used. This research uses the theory of Randall B. Ripley and Grance A. Franklin which consists of 3 dimensions, namely the level of compliance, smooth routine functioning and the absence of problems and the realization of desired performance and impact. The type of research used is descriptive with qualitative research methods. Based on data analysis, the implementation of health protocol policies at the Palembang City Regional Secretariat is not going well. Health protocol facilities are inadequate and existing facilities are not used properly. Parties involved in policies such as the covid-19 task force have not carried out their duties to the fullest. The results of this study recommend that the implementation of health protocol policies be further improved in terms of providing facilities and discipline of employees of the Palembang City Regional Secretariat.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Protocol, Health, Facilities*

*Advisor I*



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP.196311061990031001


*Advisor II*



**Dra. Martina, M.Si**  
NIP.196603051993022001

*Indralaya, 2022*

**Chairman of Department Public Administration  
Faculty of Social and Political Science  
Sriwijaya University**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP.196911101199401001

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Sekretariat Daerah Kota Palembang”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dukungan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan tulus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Ayah M. Putra dan Ibu Samsiah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
2. Abangku Esa Putra S.T dan Dua Adikku Etri Putri dan Eishea Putri.
3. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
6. Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA selaku Pembimbing Akademik.
7. Prof Dr. Kiagus Surya Muhammad Sobri, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu memberikan arahan, saran, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik beserta Staf FISIP yang terlibat dari awal sampai selesai perkuliahan ini.
10. Bapak Drs. Ratu Dewa, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Palembang.
11. Seluruh staf dan pegawai Sekretariat Daerah Kota Palembang.
12. Seluruh Sahabat dan Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2018.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, 2022



Edwia Putri



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
B. Kebijakan Publik.....	11
C. Implementasi Kebijakan.....	11

D. Teori Implementasi Kebijakan .....	12
E. Kebijakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan .....	16
F. Teori implementasi yang digunakan.....	17
G. Penelitian Terdahulu.....	19
H. Kerangka Pemikiran .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Aspek Penelitian .....	23
C. Definisi Konsep.....	23
D. Fokus Penelitian .....	24
E. Unit Analisis Data .....	26
F. Informan Kunci .....	26
G. Jenis dan Sumber Data .....	26
H. Teknik Pengumpulan Data .....	27
I. Teknik Analisis Data .....	28
J. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	31
1. Sejarah Singkat Kantor Walikota Palembang.....	31
2. Visi dan Misi.....	32
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Palembang .....	33

4. Struktur Organisasi .....	34
5. Perangkat Sekretariat Daerah Kota Palembang .....	35
B. Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang .....	37
1. Tingkat Kepatuhan Pegawai Pada Kebijakan Disiplin Protokol Kesehatan di Sekretariat Daerah Kota Palembang .....	37
2. Kelancaran Rutinitas Fungsi dan Tidak Adanya Masalah .....	47
3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Palembang .....	3
Tabel 2. Fasilitas protokol kesehatan.....	4
Tabel 3. Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4. Fokus Penelitian .....	24
Tabel 5. Letak dan kondisi Fasilitas protokol kesehatan.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Wastafel</i> di depan pintu masuk .....	5
Gambar 2. <i>Hand sanitizer</i> pada pintu masuk samping.....	6
Gambar 3. <i>Hand sanitizer</i> yang kosong pada lobi utama.....	7
Gambar 4. Alat cek suhu tubuh .....	8
Gambar 5. <i>Pamflet</i> scan vaksin PeduliLindungi .....	8
Gambar 6. Pemikiran pokok Ripley dan Franklin.....	19
Gambar 7. Kerangka Pemikiran .....	22
Gambar 8. Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	31
Gambar 9. Bagan Struktur Organisasi .....	34
Gambar 10. <i>Hand sanitizer</i> .....	42
Gambar 11. Alat cek suhu .....	43
Gambar 12. Scan PeduliLindungi.....	44
Gambar 13. <i>Wastafel</i> di dalam pekarangan.....	46
Gambar 14. Wawancara dengan pihak Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	47
Gambar 15. <i>Hand sanitizer</i> yang kosong pada lobi utama dan pintu masuk samping.....	50
Gambar 16. Wawancara dengan salah satu Satpol PP pada pintu masuk samping.....	51
Gambar 17. Pintu masuk samping .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Keputusan Skripsi
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Ke Sekretariat Daerah Kota Palembang Dari Kesatuan Bangsa Politik
- Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian Dari Sekretariat Daerah Kota Palembang
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara
- Lampiran 6. Matriks Wawancara
- Lampiran 7. Absen Pegawai Bagian Protokol Pada Wfh Dan Wfo
- Lampiran 8. Surat Edaran Walikota No 38/Se/Dinkes/2020
- Lampiran 9. Surat Edaran Walikota No 26/Se/Disnaker/2021
- Lampiran 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI
- Lampiran 11. SK Satgas Covid-19 Palembang
- Lampiran 12. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing 1
- Lampiran 13. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing 2
- Lampiran 14. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 15. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 16. Lembar Revisi Seminar Proposal
- Lampiran 17. Lembar Perbaikan
- Lampiran 18. Dokumentasi Wawancara Dengan Pihak Sekretariat Daerah Kota Palembang

## **DAFTAR SINGKATAN**

Covid-19	: <i>Corona Virus Disease</i> 2019
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
No	: Nomor
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Prokes	: Protokol Kesehatan
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
Satgas	: Satuan Tugas
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
Setda	: Sekretariat Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus diimplementasikan dengan baik agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Implementasi kebijakan merupakan suatu cara yang dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yakni dengan secara langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan publik tersebut.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai jika tujuan dan sasaran belum ada. Oleh karena itu tahapan implementasi ada setelah adanya undang-undang yang ditetapkan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ialah ditentukan oleh efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan itu serta pada kelancaran rutinitas pelaksanaannya dan kepuasan pihak-pihak yang bersangkutan. Jika suatu kebijakan gagal dalam pengimplementasiannya maka disebabkan beberapa faktor salah satunya ketidakpatuhan atau ketidakikutsertaan implementor dalam pengimplementasiannya.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau biasa disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lainnya.

Salah satu kebijakan publik yang dibuat pemerintah yakni kebijakan protokol kesehatan. Kebijakan protokol kesehatan sangat penting pada saat ini dikarenakan wabah virus Covid-19 sedang menyebarluas di Indonesia. Virus ini disebut *corona virus disease*



2019 yang biasa disebut Covid-19. Covid-19 ialah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan corona virus yaitu *SARS-CoV* yang disebut Corona. Maka dari itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan undang-undang tentang Protokol kesehatan dalam hal pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. Hk.01.07/Menkes/328/2020.

Sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan diatas, Presiden mempertegas peningkatan kedisiplinan dalam menjalani era *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru pada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019. Salah satu isi Instruksi Presiden tersebut ialah Gubernur, Bupati, Walikota diinstruksikan Presiden untuk menyusun dan menetapkan regulasi yang memuat ketentuan kewajiban mematuhi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum serta sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (Covid-19).

Instruksi presiden tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap provinsi, kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Salah satunya Kota Palembang, walikota Palembang telah mengeluarkan surat edaran walikota No 38/SE/Dinkes/2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* (Covid-19) di Kota Palembang. Salah satu isi dari Surat Edaran Walikota ini ialah seluruh kepala instansi atau perangkat daerah mewajibkan pegawainya mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan faktor pendukung nya menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan seperti alat cek suhu, *wastafel* dan *hand sanitizer*.

Surat edaran ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha dan perkantoran yang ada di Kota Palembang termasuk Sekretariat Daerah Kota Palembang. Sesuai dengan isi surat edaran walikota tersebut bahwa pegawai wajib mematuhi protokol kesehatan agar menghindarkan

dari terkena Covid-19. Implementor dari kebijakan ini ialah pegawai kantor. Sekretariat Daerah Kota Palembang memiliki pegawai yang jumlahnya cukup banyak. Berikut jumlah pegawai yang ada pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Palembang**

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	
		PNS	Non PNSD
1.	Sekretaris Daerah	1	
2.	Asisten Sekda	3	
3.	Staf Ahli Walikota	3	
1.	Bag. Tata Pemerintahan	18	17
2.	Bag. Kesejahteraan Rakyat	10	31
3.	Bag. Hukum	14	14
4.	Bag. Kerja Sama	16	6
5.	Bag. Perekonomian	10	8
6.	Bag. Administrasi Pembangunan	13	8
7.	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	22	7
8.	Bag. Sumber Daya Alam	12	6
9.	Bag. Umum	37	98
10.	Bag. Organisasi	16	10
11.	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	25	35
Jumlah		<b>200</b>	

*Sumber: Diolah penulis merujuk pada data bagian umum Setda*

Berdasarkan tabel di atas jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah cukup banyak. Pegawai suatu kantor dapat mempengaruhi suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak baik dalam hal mematuhi peraturan. Tingkat kepatuhan merupakan salah satu variabel dalam mengukur keberhasilan kebijakan protokol kesehatan. Kepatuhan pegawai akan pelaksanaan kebijakan yang ada pada kantor merupakan hal yang penting pada saat pandemi Covid-19. Pegawai yang patuh terhadap protokol kesehatan dapat membuat tujuan dari kebijakan

tersebut tercapai serta lancarnya fungsi atau tugas dari pihak yang bertanggung jawab akan protokol kesehatan dapat membuat implementasi kebijakan protokol kesehatan berhasil.

Implementasi kebijakan protokol kesehatan di Sekretariat Daerah Kota Palembang kurang berjalan dengan baik. Minimnya tingkat kepatuhan pegawai akan kebijakan yang telah ada. Beberapa hal yang menjadi masalah protokol kesehatan pada kantor ini yakni Pertama, dalam hal penggunaan masker di kantor. Masker menjadi hal yang sangat wajib digunakan pada saat pandemi Covid-19. Masker dapat melindungi dari paparan virus yang bisa terjadi pada saat berbicara dengan lawan bicara.

Menggunakan masker menjadi salah satu protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh pegawai di kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang. Tetapi pada kantor ini tidak semua pegawai patuh akan halnya penggunaan masker. Banyak pegawai yang mengabaikan hal tersebut. Bahkan saat ada tamu yang datang melakukan kunjungan kerja, pegawai yang bertugas dalam hal pelayanan publik tidak memakai masker. Bahkan pada saat pengamatan langsung penulis di kantor tersebut ada tamu yang datang kunjungan kerja tidak memakai masker. Tidak adanya teguran maupun pemeriksaan bagi tamu yang tidak menggunakan masker ketika berada dikawasan kantor. Satpol PP sebagai pihak keamanan dan pendisiplinan protokol kesehatan yang seharusnya menegur dan memperingatkan setiap pegawai maupun tamu untuk menggunakan masker ketika bekerja.

Kedua, sarana prasarana atau fasilitas protokol kesehatan. Adapun fasilitas protokol kesehatan yang ada pada kantor Sekretariat daerah Kota Palembang yakni sebagai berikut:

**Tabel 2. Fasilitas protokol kesehatan**

No	Nama	Jumlah
1.	<i>Wastafel</i>	5 buah
2.	<i>Hand sanitizer</i>	2 buah

Sambungan dari tabel halaman 4

3.	Alat Cek Suhu	1 buah
4.	<i>Pamflet scan</i> vaksin pedulilindungi	1 buah

*Sumber: Diolah penulis berdasarkan data bagian umum*

Berdasarkan tabel diatas, fasilitas protokol kesehatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Palembang cukup lengkap. Fasilitas protokol kesehatan yang pertama ialah *wastafel*. *Wastafel* yang ada berjumlah lima yang letaknya satu di depan pintu masuk samping dan empat lagi letaknya di dalam pekarangan kantor. *Wastafel* yang ada berfungsi dengan baik dilengkapi dengan sabun yang masih berisi. *Wastafel* yang ada di depan pintu masuk disediakan untuk para pegawai maupun tamu yang datang mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan merupakan salah satu protokol kesehatan. Masalah yang terjadi dalam hal penggunaan *wastafel* ialah berdasarkan pengamatan langsung penulis pada saat itu, pegawai yang masuk kantor melalui pintu masuk samping jarang sekali yang mencuci tangan terlebih dahulu padahal pegawai mengerti bahwa hal tersebut merupakan protokol kesehatan akan tetapi malah diabaikan.

**Gambar 1. *Wastafel* di depan pintu masuk**



*Sumber: Dokumentasi penulis januari 2022*

Fasilitas proses yang kedua ialah *hand sanitizer*. *Hand sanitizer* pada Sekretariat Daerah Kota Palembang ada dua, satu berada pada pintu masuk samping dan satunya berada pada lobi utama. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis saat observasi awal pada Sekretariat Daerah Kota Palembang bahwa *hand sanitizer* yang ada di Sekretariat Daerah tidak berfungsi dan tidak digunakan dengan baik, misalnya yang berada pada pintu masuk samping di dekat meja Satpol PP tidak digunakan dengan baik bagi setiap orang yang masuk. Pegawai melewati pintu tersebut tanpa menggunakan *hand sanitizer* yang tersedia terlebih dahulu. Begitu juga dengan tamu yang masuk lewat sana. Padahal Satpol PP seharusnya mengingatkan agar tiap yang masuk kantor lewat pintu tersebut harus patuh proses yakni salah satunya menggunakan *hand sanitizer* terlebih dahulu. Adapun letak *hand sanitizer* pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2. *Hand sanitizer* pada pintu masuk samping**



*Sumber: Dokumentasi Penulis januari 2022*

Berkaitan dengan *hand sanitizer* diatas, penulis juga menemukan *hand sanitizer* yang kosong pada saat pengamatan langsung. Tingkat kepedulian dan tanggungjawab yang kurang oleh satgas Covid-19 ataupun pegawai akan kondisi fasilitas yang ada. Tidak dilakukannya pengecekan terhadap fasilitas yang ada, apakah fasilitas tersebut masih

berfungsi dengan baik atau tidak. *Hand sanitizer* yang ada pada lobi utama dan pada pintu masuk samping tidak ada isinya atau kosong.

**Gambar 3. *Hand sanitizer* yang kosong pada lobi utama**



*Sumber: Dokumentasi penulis januari 2022*

Fasilitas yang ketiga ialah alat cek suhu atau biasa disebut *thermometer*. Alat cek suhu berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Alat cek suhu yang ada pada Sekretariat Daerah hanya disediakan satu saja yakni pada lobi utama. Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung alat cek suhu yang ada tidak digunakan dengan baik. Dikarenakan pegawai maupun tamu yang masuk melalui pintu utama sangat jarang sekali mereka melakukan cek suhu tubuh. Satpol PP yang bertugas tidak mengingatkan untuk melakukan cek suhu sebelum masuk kawasan kantor.

Pegawai paham akan situasi Covid-19 yang saat itu sedang naik, tetapi mengikuti salah satu kebijakan protokol kesehatan saja tidak mau dan tidak peduli. Padahal sudah jelas ada alat cek suhu di lobi utama yang disediakan tapi pegawai keluar masuk Sekretariat Daerah dengan mengabaikan hal tersebut. Ada masalah lain dalam hal penyediaan alat cek suhu tubuh yakni tidak disediakan alat cek suhu tubuh pada pintu masuk samping sebab

pada Sekretariat Daerah Kota Palembang ini pegawai maupun tamu sering masuk melalui pintu masuk samping.

**Gambar 4. Alat cek suhu tubuh**



*Sumber: Dokumentasi penulis januari 2020*

Fasilitas keempat yakni *pamflet scan* vaksin PeduliLindungi. Menteri kesehatan mengatakan bahwa aplikasi *QR Code* PeduliLindungi membantu pemerintah dan masyarakat dalam menekan resiko penyebaran dikarenakan terintegrasi dengan data hasil tes pemeriksaan Covid-19 dan data vaksinasi nasional. Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang telah disediakan *pamflet scan* vaksin akan tetapi hanya menjadi pajangan saja dan tidak digunakan dengan baik.

**Gambar 5. Pamflet scan vaksin PeduliLindungi**



*Sumber: Dokumentasi penulis juli 2022*

Salah satu cara yang dilakukan agar mengetahui apakah kita terkena Covid-19 yakni dengan tes *swab/antigen*. Tes *swab* atau *antigen* pada Sekretariat Daerah Kota Palembang tidak ada kewajiban rutin untuk dilakukan tiap bulannya. Berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu anggota satuan tugas Covid-19 Ibu Dr. Korlena mengatakan:

“Berkaitan dengan tes *swab* di Setda sendiri tidak diwajibkan nya tes *swab* tiap bulan, Cuma diwajibkan jika kita merasa diri kita terkena gejala Covid-19. Jadi ketika diri sendiri merasa mengalami gejala Covid-19 seperti demam, batuk, tidak berfungsinya indra penciuman, maka wajib melakukan tes *swab* mandiri dan karantina mandiri.”(Wawancara Juli 2022)

Bahkan ketika awal mula diberlakukannya protokol kesehatan, proses birokrasi kantor sangat kacau dan proses surat ataupun berkas masuk sangat lambat dikarenakan banyak pegawai maupun kepala bagian yang terkena Covid-19 akibat tidak mematuhi kebijakan protokol kesehatan yang telah berlaku. Berdasarkan wawancara langsung penulis dengan salah satu pegawai bagian umum Bapak Abi mengatakan:

“Pada pertengahan tahun 2021, pegawai maupun kepala kepala bagian banyak terkena Covid-19. Pada saat mengirimkan berkas dari instansi lain, pejabat atau yang memegang peranan tinggi dalam setda ini banyak yang sedang isolasi mandiri, maka proses surat nya memakan waktu yang lebih lama. Itu salah satu kesulitannya. Kesulitan selanjutnya, kurang koordinasi antara pegawai yang *Work from home* pada hari itu dan yang *Work from office* pada hari itu. Sering terjadinya komunikasi yang salah. Maka dapat dikatakan birokrasi pada saat Covid-19 itu kurang berjalan dengan baik dikarenakan adanya keterlambatan surat dan proses alur surat yang panjang. Tetapi untungnya surat yang masuk pertengahan tahun 2021 itu tidak terlalu banyak.” (Wawancara 26 Juli 2022)

Dapat dilihat dari beberapa uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan protokol kesehatan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang kurang berjalan dengan baik. Mulai dari hal mematuhi protokol kesehatan, kelalaian tugas dari pihak yang bertanggung jawab sampai dengan penggunaan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin**



**Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2021”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah **Bagaimana Implementasi kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* pada Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2021 ?**

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* pada Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2021.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan akan implementasi suatu kebijakan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberi masukan kepada pemerintah kota khususnya kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam menjalani aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
- Nugroho, Riant. 2021. *Public Policy*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik ( Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

### Skripsi

- Esviansyah, David Fathoni. 2021. *Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Di Masjid Kelurahan Petukangan Utara*. Skripsi. Jakarta: Program Sarjana Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Perdana, Ibrayoga Rizki. 2019. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi. Palembang: Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
- Sastri, Nirmala. 2021. *Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 New Normal Di SDN 3 Batu Kumbang Tahun Pelajaran 2020/2021*. Skripsi. Mataram: Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah.
- Wahyuni, Evi. 2021. *Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*. Skripsi. Jawa Timur: Program Sarjana Administrasi Publik UPN Veteran.

### Peraturan Pemerintah

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).2020*. Jakarta: Sekretariat Website JDIH BPK RI.
- Keputusan Walikota Palembang Nomor 237/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Palembang*. Palembang: JDIH Kota Palembang.
- Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 26/SE/DISNAKER/2021 Tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Tempat Kerja Dan Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Para Pekerja/ Buruh Oleh Perusahaan Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019. 2021*. Palembang: JDIH Kota Palembang.
- Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 38/SE/DINKES/2020 Tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Menuju Masyarakat Yang Produktif Dan Aman Corona*

*Virus Disease (Covid-19) Di Kota Palembang*. Palembang: Website Dinas Kesehatan Kota Palembang.

**Internet (Jurnal)**

Aghniya, D. A., Nafi, I., & Saifuddin, M. (2022). Efektivitas Penerapan 5M sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, (Online), Vol. 3, No. 1, (<https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1008>, diakses 15 Maret 2022).

Ahmad Fauzi. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, (Online), Vol. 16, No.1, (<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7946>, diakses 11 Februari 2022).

Sari, R. K. (2021). Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, (Online), Vol. 6, No. 1, (<http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1354>, diakses 21 Februari 2022).